



ANALISIS ARAH KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN IPM

Yusuf Hasbullah, Mar'i Fauzi, Siti Fatimah, Titi Yuniarti, Syarifudin✉

Universitas Mataram, Indonesia

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Received : 2012; Accepted: 2012; Published: September 2012

Abstract

This research aimed to gain insight on growth of level of economy and education sector related to accelerating Human Development Index (HDI) in West Nusa Tenggara province. The result of this research showed that in 2009, the economic growth had increased 12.11% in which the mining sector and excavation had the highest rate in total of 28.17%. Meanwhile, in 2010 it has decreased as much as 6.29% and in 2012 it reached 99.49%, for SMP/MTS 87.97% for SMA/MA 49.35%. APK SD/MI for year 2012 was 114.91% for SMP/MTS 100.20% and for SMA/MA 77.29% APS level SD/MI year 2014 decreased become 0.34%, level SMP/MTS was 1.45% and level SMA/MA decreased in total 2.18%, AMH year 2012 decreased become 96.70%. AMS level SD/MI year 2011 in total was 87.785 people, level SMP/MTS in total was 73.610 people and SMA level was 191.411 people. Having known the above variables, it is expected that the result of this research will be used as an evaluation material and also as consideration in planning and making the policy. Therefore, this will enable policy makers to determine programs priority to fasten development and increase index human development (IPM) in West Nusa Tenggara in the next coming years.

Keywords: economic policy, education, HDI

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi dan sektor pendidikan yang berkaitan dengan percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi meningkat 12,11% di mana sektor pertambangan dan penggalian memiliki tingkat tertinggi sebesar 28,17%. Sementara itu, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 6,29% dan pada tahun 2012 mencapai 99,49%, untuk SMP / MTS 87,97% untuk SMA / MA 49,35%. APK SD / MI untuk tahun 2012 adalah 114,91% untuk SMP / MTS 100,20% dan untuk SMA / MA 77,29% tingkat APS SD / MI tahun 2014 menurun menjadi 0,34%, tingkat SMP / MTS itu 1,45% dan tingkat SMA / MA menurun secara total 2,18%, AMH tahun 2012 menurun menjadi 96,70%. AMS tingkat SD / MI tahun 2011 di total adalah 87.785 orang, tingkat SMP / M.TS total adalah 73.610 orang dan tingkat SMA adalah 191.411 orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk menentukan prioritas program untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat pada tahun-tahun yang akan datang.

Kata Kunci: kebijakan ekonomi, pendidikan, IPM

How to Cite: Yusuf Hasbullah, dkk. (2012). Analisis Arah Kebijakan Ekonomi Terhadap Sektor Pendidikan Dalam Peningkatan IPM. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 5 (2): 127-229 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596

© 2012 Semarang State University. All rights reserved

PENDAHULUAN

Hubungan antara pembangunan manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan pembangunan ekonomi telah lama diteliti. Pembangunan sumber daya manusia berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui perilaku secara umum, keahlian tertentu, mengurangi kelahiran, dan meningkatkan taraf hidup manusia (Omojimate, 2011).

Menurut Mirza (2011) salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia.

Pendidikan yang lebih tinggi mempunyai peran vital dalam membentuk generasi mendatang untuk mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan (Khorasgani, 2008). Li dan Liang (2010) menyarankan agar pembuat kebijakan untuk berinvestasi lebih banyak di dunia pendidikan karena hasil penelitian mereka di Asia Timur menyatakan bahwa investasi dalam bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun jumlah nominalnya masih lebih kecil dibandingkan dengan investasi di bidang kesehatan. Tinggi besarnya pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada anggaran pendidikan yang disediakan oleh negara (Teles dan Andrade, 2008).

Secara umum berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 ada enam puluh lima (65) indikator kinerja yang tercantum guna pencapaian Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Beriman dan Berdaya uprogram melalui setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Mengawali hubungan kausal antara pengeluaran pemerintah dengan pendapatan nasional (Loizides, 2005). Peningkatan pendapatan nasional melalui peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah pada

akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pendapatan per kapita. Sasaran dan program dimaksud diuraikan lagi dalam bentuk program prioritas dengan masing-masing indikator yang secara kuantitatif dapat diukur. Adapun Misi pemerintah Nusa Tenggara Barat meliputi: masyarakat sejahtera, masyarakat sehat, masyarakat cerdas dan trampil dan masyarakat berwawasan Iptek. Penelitian ini lebih mengarah pada pencapaian dua misi yang meliputi: masyarakat sejahtera dan masyarakat cerdas.

Berangkat dari indikator kinerja tersebut penulis dalam hal ini akan fokus pada bagaimana sasaran masyarakat sejahtera dan masyarakat cerdas. Sasaran masyarakat sejahtera akan ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi secara time series, sedangkan sasaran masyarakat cerdas akan dilihat melalui indikator pendidikan yang meliputi: APK, APM, APtS, AMS, dan AMH. Hal ini bisa dicapai melalui berbagai program prioritas yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terkait secara langsung dalam pencapaian sasaran dimaksud. Kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan SKPD Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) dalam hendaknya mampu menciptakan iklim investasi dana menarik para investor melalui kebijakan one gate policy-nya sehingga menambah jumlah investasi yang masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disisi yang lain SKPD Depdikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan sasaran dan program prioritas dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) telah menetapkan indikator kinerja guna percepatan pembangunan sumberdaya manusia sebagai berikut: peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RrLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Melanjutkan Sekolah (AMS). Pada tahun 1990 UNDP memperkenalkan Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia). Pembangunan manusia menurut UNDP adalah proses memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dari sekian banyak

pilihan ada tiga pilihan paling penting yaitu panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan standar hidup yang layak (Gunting, K. C. et al, 2008). Ini diperkuat oleh Penelitian Khorasgani (2008) di Iran.

Sejalan dengan target capaian dalam RPJMD 2009-2013 bidang ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup optimis, namun dalam kenyataannya berdasarkan hasil evaluasi terakhir ditemukan masih ada sekurang-kurangnya ada lima (5) indikator yang masih cukup sulit dicapai. Diantara lima indikator tersebut dua diantaranya seperti: pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih memerlukan dukungan baik secara politis maupun ekonomis (financial) agar percepatan pencapaiannya dapat diwujudkan paling tidak sampai dengan akhir tahun 2013 yang akan datang. Indikator ini memang tidak dapat didorong dalam waktu yang relatif singkat, namun membutuhkan waktu yang relatif lama, karena menyangkut mengenai perubahan pola pikir dan cara pandang yang menyangkut tentang kehidupan sosial budaya masyarakat daerah.

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: a) Apakah pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dapat dicapai sesuai dengan target RPJMD 2009-2013 yang sekaligus secara bersama-sama dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b) Apakah sektor pendidikan melalui indikator APK, APM, APS, AptS, AMS dan AMH dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu Negara/wilayah/daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya infrastruktur ekonomi. Ada beberapa konsep definisi yang umum digunakan dalam analisis ekonomi seperti (1) Produk Domestik Regional Brutto atas Dasar Harga Pasar yang merupakan penjumlahan nilai tambah brutto dari seluruh sektor

prekonomian di dalam suatu wilayah dalam priode tertentu, biasanya satu tahun. Yang dimaksudkan dengan nilai tambah adalah selisih biaya produksi dengan biaya antara; (2) Produk Domestik Regional Netto atas Dasar Harga Pasar, merupakan nilai PDRB yang dikurangi dengan nilai penyusutan. Nilai Penyusutan dikeluarkan dari nilai PDRB karena terjadinya penyusutan barang-barang modal selama dalam proses produksi; (3) Produk Domestik Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor merupakan PDRN atas dasar harga pas setelah dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi dari pemerintah.

Pendapatan Regional merupakan pendapatan penduduk yang masuk dan keluar dapat dicatat dengan pendapatan netto antar wilayah/daerah didapatkan pendapatan regional (Produk regional Brutto). Karena sulitnya memperoleh data pendapatan masuk dan keluar suatu wilayah maka PDRN (Produk Domestik Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor) diasumsikan sama dengan pendapatan regional atau pendapatan netto.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing per kepala penduduk. Pendapatan per kapita tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 ada 65 (enam puluh lima) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai dasar acuan analisis pencapaian berbagai program setiap SKPD. Namun dalam penelitian ini ada dua sasaran yang tertuang dalam misi daerah yang akan dianalisis meliputi: masyarakat sejahtera dan masyarakat cerdas. Untuk mencapai sasaran pada sektor pendidikan khususnya telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai berikut: Rata-rata Lama Sekolah (RrLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Rata-rata Lama Sekolah (RrLS)

Dilihat dari kondisi awal berdasarkan data RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB tahun 2008, 2009 dan 2010, masih berada pada posisi 6,70 tahun, 6,73 tahun, 6,77 tahun dan 6,85 pada tahun 2011. Jika kita bandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 7,5 tahun (BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008). Ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya namun peningkatannya relatif masih rendah. Artinya bahwa rata-rata penduduk NTB baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Ini berarti penduduk NTB sebagian besar drop-out pada saat kelas 2 SMP/M.Ts.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2011 melebihi angka 100 persen, konkritnya sebesar 110,47 persen, artinya bahwa masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (underage) dan di atas 12 tahun (overage) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat (SD/MI). Berdasarkan angka proyeksi diharapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk tahun 2012 sebesar 111,91 persen dan tahun 2013 sebesar 111,91 persen. Jika dibandingkan dengan data Indonesia tahun 2010 angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI sebesar 116,63 persen. NTB pada tahun dan jenjang pendidikan yang sama APK-nya sebesar 109,03 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/M.Ts) Angka Partisipasi Kasar (APK) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi Angka Partisipasi kasar untuk tahun 2011 sebesar 99,60 persen. Artinya bahwa secara kuantitatif siswa yang berumur di atas 12 tahun masih mengikuti pendidikan di tingkat SMP/M.Ts. Dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK) tahun 2010 secara nasional sebesar 80,35 persen. NTB pada tahun dan jenjang yang sama APK-nya sebesar 99,00 persen. (Target RPJMD 2009-2013)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar di NTB meningkat secara

konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mencapai 99,03 persen. Berdasarkan angka proyeksi angka partisipasi murni (APM) tahun 2012 meningkat menjadi 99,49 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,95 persen. Jika kita bandingkan dengan APM secara nasional tingkat SD/MI sebesar 94,72 persen. NTB APM-nya dalam kurun waktu dan jenjang pendidikan yang sama sebesar 98,58 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/M.Ts juga mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2011 angka Partisipasi Murni (APM) telah mencapai 85,87 persen. Berdasarkan angka proyeksi pada tahun 2012 juga akan mengalami peningkatan menjadi 87,97 persen dan tahun 2013 akan menjadi 90,07 persen. Jika dibandingkan dengan APM secara nasional sebesar 67,62 tahun. NTB APM-nya dalam kurun waktu dan jenjang pendidikan yang sama (Tahun 2010) sebesar 83,77 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas SMA/MA, angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 sebesar 61,63 persen. Berdasarkan angka proyeksi angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2012 sebesar 65,67 persen dan mengalami peningkatan menjadi 70,12 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan APM secara nasional sebesar 45,48 tahun. Sedangkan posisi NTB APM-nya dalam kurun waktu (tahun 2010) dan jenjang yang sama sebesar 57,38 persen.

Angka Putus Sekolah (APtS)

Berdasarkan data Dinas Dikpora tahun 2010 Angka Putus Sekolah (APtS) di provinsi NTB kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) telah mengalami penurunan dari 0,52 persen tahun 2010 menjadi 0,48 persen tahun 2011. Selanjutnya berdasarkan data proyeksi tahun 2012 angka putus sekolah (APtS) mengalami penurunan menjadi 0,34 persen dan 0,20 persen pada tahun 2013. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) kelompok umur 13-15 tahun (SMP/M/Ts) juga terus mengalami penurunan secara signifikan. Kenyataan ini ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah (APtS) dari tahun 2010 sebesar 3,35 persen

menjadi 2,40 persen tahun 2011. Sementara berdasarkan data proyeksi tahun 2012 angka putus sekolah (APtS) akan menjadi 1,45 persen dan terus turun menjadi 0,50 persen di tahun 2013.

Angka Melek Huruf (AMH)

Dilihat dari perkembangan angka melek huruf di provinsi NTB secara kuantitatif berdasarkan data Dikpora tahun 2010 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang melek huruf. Secara time series dari waktu ke waktu angka melek huruf terus mengalami peningkatan. Data tahun 2010 menunjukkan angka melek huruf di provinsi NTB sebesar 88,45 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 92,10 persen. Selanjutnya berdasarkan angka proyeksi angka melek huruf di tahun 2012 akan menjadi 96,70 persen dan akan meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2013. Artinya diharapkan Dikpora melalui penyusunan program dan kegiatannya kedepan akan mampu secara tuntas membebaskan masyarakat NTB dari angka buta huruf. Optimisme Dinas Dikpora Provinsi NTB dapat dicapai melalui berbagai

program diantaranya program keaksaraan fungsional dan program pendidikan pendampingan non formal lainnya.

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Sebagai implikasi dari pembebasan masyarakat NTB dari buta huruf, penurunan angka putus sekolah (APtS) dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah (AMS), maka secara konsisten pemerintah melalui Dinas Dikpora NTB melaksanakan program keaksaraan fungsional dan pemberian beasiswa kepada penduduk miskin. Menurut data RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 Angka melanjutkan sekolah (AMS) tingkat SD/MI di NTB tahun 2008 sebanyak 95.373, tahun 2009 sebanyak 87.511 dan tahun 2011 sebanyak 87.785. Adapun angka melanjutkan sekolah tingkat SMP/M.Ts tahun 2008 sebanyak 64.973, tahun 2009 sebanyak 66.897 dan tahun 2010 sebanyak 73.610. Sedangkan angka melanjutkan sekolah tingkat SMA/MA tahun 2007 sebanyak 167.732, tahun 2008 sebanyak 178.850, tahun 2009 sebanyak 190.661 dan tahun 2010 sebanyak 191.411 orang.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2000 Menurut Sektor Th 2006 – 2010

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010
Pertanian	2,88	2,90	5,53	2,95	1,14
Pertambangan dan Penggalian	(2,88)	2,76	(9,09)	28,71	11,71
Industri Pengolahan	2,82	9,96	8,73	8,72	3,77
Listrik, Gas dan Air Bersih	11,46	10,94	9,73	10,52	9,94
Konstruksi	6,45	7,59	8,76	16,74	1,68
Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,78	7,99	6,59	8,11	6,13
Pengangkutan dan Komunikasi	7,49	7,15	4,42	5,59	7,32
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,90	9,01	10,22	8,48	5,48
Jasa- Jasa	2,84	3,32	9,02	9,62	8,88
PDRB	2,71	4,91	2,82	12,11	6,29

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2011

Tabel 2. PDRB ADHB, ADHK dan PDRB per Kapita NTB Tahun 2006 – 2010

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
PDRB Per kapita ADHB (Ribu Rupiah)	6.640,895	7.696,591	8.071,089	9.874,136	10.968,974
PDRB Per Kapita ADHK (Rupiah)	3.623,578	3.758,318	3.821,081	4.235,892	4.456,856

Tabel 3. Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 – 2010.

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Penduduk > 15 thn	2.975.923	3.205.650	2.997.725	3.059.611	3.380.129
Laki-laki (%)	1.410.323 (47,39)	1.433.875(44,73)	1.400.900(46,73)	1.430.474(46,75)	1.606.551(47,53)
Perempuan (%)	1.565.600 (52,61)	1.591.775(55,27)	1.596.825(53,27)	1.626.137(53,25)	1.773.578(52,47)
Angkatan kerja	2.093.075	2.086.446	2.029.081	2.098.636	2.252.076
Laki-laki (%)	1.180.022(57,87)	1.169.915(56,07)	1.136.835(56,03)	1.181.891 (56,32)	1.303.836(57,89)
Perempuan (%)	913.053(42,13)	916.531(43,93)	892.246(43,97)	916.747(33,68)	948.820(42,11)
TPAK (%)	70,33	68,96	67,69	68,59	66,63
Bekerja	1.906.816	1.951.182	1.904.781	1.967.380	2.132.933
Laki-laki (%)	1.085.988(56,95)	1.096.055(56,17)	1.068.498(56,10)	1.104.128 (56,12)	1.231.343(57,73)
Perempuan (%)	820.828(43,05)	855.127(43,83)	836.283(43,90)	863.252 (43,88)	901.590(42,27)
Pengangguran	186.259	135.264	124.300	131.258	119.143
Laki-laki (%)	94.034 (50,49)	73.660 (54,46)	68.337(54,98)	77.763 (59,24)	72.493 (60,85)
Perempuan (%)	92.225(49,51)	61.404(45,54)	55.963 (45,02)	53.495 (40,76)	46.650 (39,15)
TPK	9,77	6,93	6,53	6,25	5,29
B A K	882.848	939.204	968.664	957.973	1.128.053
Laki-laki (%)	230.301(26,09)	263.960 (28,10)	264.065(27,36)	248.583 (25,95)	302.715 (26,84)
Perempuan (%)	652.547(73,91)	675.244 (72,90)	704.579(72,64)	709.390 (74,05)	825.338 (73,16)

Sumber: BPS NTB, (2006 – 2011), diolah

METODE PENELITIAN

Menurut tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:11). Selanjutnya menurut Kuncoro (2003:8) Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini akan didiskripsikan perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat secara time series. Selanjutnya deskripsi tentang perkembangan APK, APS, APM, APS dan APtS pada berbagai tingkat pendidikan secara komprehensif sehingga dengan gambaran tersebut akan dapat dilihat dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data yang dikumpulkan dalam

penelitian meliputi data APBD, PDRB, APK, APS, APS dan AptS selama kurun waktu Tahun 2007-2011 dengan cara:

Studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal ilmiah serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan analisis pertumbuhan APBD, PDRB dan data-data APK, APS, APS dan AptS pada berbagai jenjang pendidikan sesuai dengan judul penelitian.

Penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terutama pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTB sehubungan dengan data-data dan informasi terkait dengan variabel-variabel penelitian di atas.

Analisis Pertumbuhan Ekonomi (PAD Terhadap PDRB)

Guna mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (2006-2010) akan dianalisis dengan formulasi Widodo dalam Hasbullah (2003: 36) sbb:

$$\Delta X_t = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana ΔX_t merupakan Laju pertumbuhan PDRB, X_{it} adalah PDRB, t mengacu pada tahun t , sementara $t-1$ adalah Tahun Sebelumnya dan X_{t-1} menunjukkan Variabel PDRB

Analisis Faktor Pendidikan

Analisis Faktor Pendidikan yang dilakukan meliputi: a) Angka Partisipasi Kasar (APK); b) Angka Partisipasi Sekolah (APS); c) Angka Partisipasi Murni (APM); d) Angka Putus Sekolah (APtS); e) Angka Melanjutkan Sekolah (AMS); e) Angka Melek Huruf (AMH)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja perekonomian NTB selama 5 tahun terakhir (2006 – 2010) berdasarkan pada variabel inflasi menunjukkan kondisi yang cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya inflasi pada tahun 2006 sebesar 4,17%, tahun 2007 dan tahun 2008 meningkat masing – masing menjadi 8,76% dan 13,01% sedangkan tahun 2009 menurun menjadi 3,41% dan 2010 meningkat menjadi 10,08%. Rata-rata laju inflasi NTB selama 5 tahun terakhir sebesar 7,87% nilai ini masih lebih tinggi dari rata-rata laju inflasi nasional (5,41%). Penyebab terjadinya inflasi tersebut bersumber baik dari kondisi eksternal maupun internal NTB. Adapun penyebab terjadinya inflasi tersebut antara lain terjadinya krisis financial global akhir tahun 2008, anomali cuaca yang menyebabkan harga pangan yang meningkat, serta harga BBM yang meningkat. Disamping faktor tersebut penyebab inflasi di NTB karena jalur distribusi dan struktur pasar yang belum baik.

Disisi lain, bila dilihat inflasi yang terjadi selama tahun 2011 dapat diketahui bahwa inflasi pada tahun 2011 cenderung menurun hal ini dapat dilihat dari inflasi triwulan I 2011(yoy) sebesar 7,83% dan inflasi triwulan II 5,85%, namun demikian

inflasi ini tetap masih lebih tinggi dari inflasi nasional (inflasi nasional triwulan II (yoy) 5,54%.

Berdasarkan pada variabel pertumbuhan ekonomi dapat diketahui bahwa kinerja perekonomian daerah selama periode 2006 – 2010 cukup baik hal ini dapat dilihat baik dari perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2000.

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi NTB akan berdampak secara tidak langsung terhadap perlambatan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat bila diukur dari PDRB per kapita yang merupakan pembagian total PDRB ADHB dengan jumlah penduduk tengah tahun atau pembagian total PDRB ADHK dengan jumlah penduduk tengah tahun.

Pada tabel di atas terlihat bahwa selalu terjadi peningkatan pendapatan perkapita baik yang dihitung dengan ADHB maupun yang dihitung dengan ADHK. Namun bila dikaji lebih jauh perkembangan pendapatan perkapita tersebut pada tahun 2008 relatif rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun sesudahnya hal ini sebagai akibat dari menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.

a. Aspek Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan bagian dari variabel ketenagakerjaan yang merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang menjadi perhatian utama pemerintah. Ketenagakerjaan di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang signifikan, terlihat dalam Tabel 3 berikut.

Dari Tabel 3 dapat terlihat, bahwa penduduk yang tergolong usia 15 tahun ke atas terjadi fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,58%. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki, namun pertumbuhan angkatan kerja perempuan sebesar 2,53% sementara pertumbuhan angkatan kerja laki-laki sebesar 2,64% yang mengindikasikan bahwa selama periode waktu 2006 – 2010 perkembangan angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan

dengan perkembangan angkatan kerja perempuan. Kondisi ini dapat dilihat lebih lanjut pada data tentang penduduk yang tergolong sebagai Bukan Angkatan Kerja yang menunjukkan penduduk perempuan lebih dominan dibanding dengan penduduk laki-laki.

b. Aspek Kemiskinan

Mengurangi jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat merupakan komitmen pemerintah yang dituangkan dalam focus program secara terintegratif. Upaya ini dilakukan melalui program-program prioritas agar target yang diharapkan dalam RPJMD tahun 2009-2013 dapat dicapai. Sebagai langkah konkrit pemerintah dalam focus program penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat melalui pemetaan secara lengkap dan detail terhadap kantong-kantong daerah miskin. Selanjutnya hasil pemetaan tersebut diimplementasikan melalui program-program SKPD dengan melakukan pengelompokan terlebih dahulu berdasarkan cluster. Cluster I meliputi: perlindungan dan bantuan sosial (berbasis rumah tangga) dengan focus program pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan beban hidup dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Cluster II meliputi pemberdayaan kelompok masyarakat (kelompok Pokmas) dengan focus program melalui pengembangan potensi, penguatan kapasitas kelompok masyarakat. Cluster III meliputi pengembangan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (kelompok usaha) dengan fokus penguatan akses permodalan, pengembangan industri pengolahan, perluasan akses pasardan Cluster IV meliputi: program pendukung (berbasis kewilayahan) dengan focus program penguatan ekonomi dan sosial budaya dengan memadukan berbagai potensi dan keberagaman daerah menjadi satu tindakan aksi yang konkrit sehingga terciptanya keserasian, kelembagaan tim penanggulangan kemiskinan yang sudah ada di masing-masing wilayah melalui penyusunan pedoman dan cara kerja yang sama.

Berdasarkan capaian kinerja

pemerintah provinsi NTB telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran terbuka yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam kurun waktu 2009-2013. Sebagai gambaran secara time series persentase penduduk miskin tahun 2007/2008 sebesar 24,99 persen terus mengalami penurunan menjadi 22,10 persen pada tahun 2009 dan menjadi 20,0 persen pada tahun 2010. Sementara angka pengangguran terbuka pada kurun waktu yang sama yaitu tahun 2007/2008 sebesar 6,48 persen mengalami penurunan dari 6,20 persen pada tahun 2009 menjadi 6,00 persen pada tahun 2010.

Dilihat dari sisi angka pengangguran terbuka telah mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dalam tahun 2009, 0,2 persen dalam tahun 2010 dan diperkirakan dalam tahun 2011 penurunan tersebut menjadi 0,50 persen. (RPJMD 2009-2013). Jika dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama sekitar 8,0 persen mestinya laju penurunan angka kemiskinan mestinya akan menurun lebih besar lagi. Selain itu guna mempercepat penurunan angka kemiskinan maka pemerintah melalui berbagai terobosan dan program pengembangan produk unggulan selalu berupaya terus menerus. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran selain dilakukan dengan menciptakan kesempatan kerja juga melalui perbaikan bidang infrastruktur ekonomi yang mendukung kegiatan-kegiatan produksi dan konsumsi.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2010.

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Pengangguran Terbuka (%)
2007/2008	24,99	6,48
2009	22,10	6,20
2010	21,55	6,00
2011 Triwulan II	19,73	5,50

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2011

Di lain sisi pertumbuhan ekonomi target 6,70% pada tahun 2012 relatif tidak terlalu sulit untuk dicapai mengingat dari sisi permintaan, kegiatan

Tabel 5. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2011

Kegiatan Utama	Uraian Pebruari 2011
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	3.119.937 orang
Angkatan Kerja	2.174.164 orang
a. Bekerja	2.057.752 orang
b. Pengangguran	116.412 orang
Bukan Angkatan Kerja	945.773 orang
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK=%)	69,69%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT=%)	5,35%
Setengah Penganggur	773.542 orang

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2011

Tabel 6. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2011

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Pertanian	965.722	46,93
Industri Pengolahan	150.037	7,29
Bangunan	102.773	4,99
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	408.874	19,87
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	107.188	5,21
Jasa-jasa	277.995	13,50
Lainnya *)	45.203	2,20
Total	2.057.752	100,00

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2011

Catatan: *) Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Bersih serta Keuangan

konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi akan terus mengalami peningkatan seiring membaiknya daya beli masyarakat. Dari aspek lain, peningkatan produktivitas serta diversifikasi pada Sektor Pertanian dengan program unggulan lingkup rumpun hijau, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran. Lebih lanjut, kendala disektor Pertambangan baik untuk PT. NNT maupun lainnya relatif sudah dapat terselesaikan. Disamping hal tersebut dengan telah beroperasinya Bandar Internasional Lombok (BIL) akan mempermudah arus transportasi sehingga akhirnya akan meningkatkan kinerja sektor perdagangan, hotel dan restaurant dengan demikian pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Kesempatan Kerja dan Pengangguran, serta Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun-tahun mendatang, berikut disampaikan tentang kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011.

Berdasarkan data Tabel 5 dapat diketahui bahwa Jumlah penduduk yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun ke atas) pada bulan Pebruari 2011 mencapai 3.119.937 jiwa atau sekitar 69,33% dari total penduduk NTB berdasarkan sensus Penduduk tahun 2010 yang mencapai 4.500.212 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja dipastikan akan mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambahnya usia penduduk dari tahun sebelumnya (14 tahun), sehingga berdampak pada jumlah penduduk yang tergolong sebagai Angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja.

Penduduk yang tergolong sebagai Angkatan Kerja sebanyak 2.174.164 orang atau sekitar 69,69% sekaligus menunjukkan besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin bertambah jumlah angkatan kerja menunjukkan semakin meningkatnya TPAK yang diharapkan akan dapat memberikandampakterhadap peluang angkatan kerja untuk memasuki lapangan pekerjaan. Pada sisi lain meningkatnya Angkatan Kerja dan TPAK sekaligus akan dapat menunjukkan jumlah Angkatan Kerja yang sudah bekerja dan belum bekerja (menganggur). Jumlah Angkatan kerja yang telah memiliki kesempatan kerja hingga Pebruari 2011 sebanyak 2.057.752 orang atau sebesar 65,96% dari seluruh penduduk Usia kerja dan sebesar 96,65% sedangkan sisanya sebesar 34,04% merupakan penduduk yang tidak bekerja (termasuk bukan angkatan kerja) dan sebesar 5,35% dari total angkatan kerja yang digolongkan sebagai penganggur sekaligus menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Penduduk yang memiliki kesempatan kerja (bekerja) sebesar 65,69% mencerminkan bahwa penduduk Nusa Tenggara Barat telah memiliki sumber penghasilan tetap yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi keberlangsungan diri dan keluarganya. Di lihat dari sebaran penduduk berdasarkan sektor usaha, nampaknya kontribusi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja masih lebih tinggi dibanding sektor lainnya, yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian masih memberikan peluang bagi penduduk untuk bekerja meskipun dipastikan peranya dalam pembentukan PDRB NTB mengalami penurunan. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan srstrategis yang berkaitan dengan sektor pertanian untuk saat ini masih diprioritaskan.

Sektor usaha lain yang memberikan peluang kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja adalah masing-masing sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan Sektor Jasa-jasa yang telah mencapai di atas 10%. Kedua sektor ini merupakan sektor yang menjadi tumpuan harapan bagi sejumlah

besar penduduk di NTB terutama di Pulau Lombok, karena seiring dengan terdapatnya berbagai obyek Wisata yang memiliki prospek yang semakin cerah sekaligus sebagai salah satu daerah penyangga pariwisata nasional.

Salah satu sektor yang dapat dikembangkan berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru adalah sektor pariwisata. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan, seiring dengan telah beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang diharapkan akan berpengaruh pada kondisi perekonomian NTB. Beroperasinya BIL setidaknya telah memberikan ruang untuk membuka kesempatan kerja baru bagi penduduk usia kerja, karena banyak peluang yang dapat dikembangkan sebagai sumber lapangan kerja baru.

Sesuai dengan target RPJMD Tahun 2009-2013 pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,00 persen per tahun dan angka pengangguran 0,50 persen per tahun. Penurunan ini diharapkan akan dapat tercapai mengingat sejak tanggal 1 Oktober 2011 telah mulai dioperasikannya Bandara Internasional Lombok (BIL), mulainya pengerjaan Dam Pandanduri, investasi pengusaha di Mandilka Resort/ Pantai Putri Nyale di Lombok Tengah, serta berkembangnya kawasan-kawasan strategis di Teluk Saleh, Teluk Bima, Sape Waworada, Hu'u dan berbagai kawasan agropolitan lainnya.

Indikator Pendidikan

Berdasarkan indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 ada beberapa sasaran yang hendak dicapai seperti: masyarakat sejahtera, masyarakat sehat, masyarakat cerdas dan trampil dan masyarakat berwawasan Iptek. Untuk mencapai sasaran dimaksud telah ditetapkan ada 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang dianalisis. Namun terkait dengan penelitian ini kami fokuskan pada salah satu sektor pengamatan saja, khususnya di bidang

pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada 6 (enam) indikator yang akan di analisis seperti: (1) Rata-rata Lama Sekolah (RrLS), (2) Angka Partisipasi Kasar (APK), (3) Angka Partisipasi Murni (APM), (4) Angka Putus Sekolah (APS), (5) Angka Melek Huruf (AMH) dan (6) Angka Melanjutkan Sekolah (AMS).

Rata-rata Lama Sekolah (RrLS)

Dilihat dari kondisi awal berdasarkan data RPJMD Provinsi NTB tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB tahun 2008, 2009 dan 2010, masih berada pada posisi 6,70 tahun, 6,73 tahun, 6,77 tahun dan 6,85 pada tahun 2011. Jika kita bandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 7,5 tahun (BPS, Indikator Kesra 2007 & 2008). Ini mengindikasikan bahwa walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya namun peningkatannya relatif masih rendah. Artinya bahwa rata-rata penduduk NTB baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP. Ini dimungkinkan karena masih tingginya angka drop-out pada masing-masing tingkatan pendidikan. Dilihat dari hasil proyeksi tahun 2012, maka rata-rata lama sekolah masyarakat NTB meningkat menjadi 6,94 selanjutnya menjadi 7,00 pada tahun 2013 dengan pola masih seperti tersebut di atas.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2011 melebihi angka 100 persen, konkritnya sebesar 110,47 persen, artinya bahwa masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (underage) dan di atas 12 tahun (overage) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat (SD/MI). Berdasarkan angka proyeksi diharapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk tahun 2012 sebesar 111,91 persen dan tahun 2013 sebesar 111,91 persen.

Jika dibandingkan dengan data Indonesia tahun 2010 angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/MI sebesar 116,63 persen. NTB pada tahun dan jenjang pendidikan yang sama APK-nya sebesar 109,03 persen.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/M.Ts) Angka Partisipasi Kasar (APK) juga mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi Angka Partisipasi kasar untuk tahun 2011 sebesar 99,60 persen. Artinya bahwa secara kuantitatif siswa yang berumur di atas 12 tahun masih mengikuti pendidikan di tingkat SMP/M.Ts. Dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK) tahun 2010 secara nasional sebesar 80,35 persen. NTB pada tahun dan jenjang yang sama APK-nya sebesar 99,00 persen. Berdasarkan angka proyeksi diharapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk tahun 2012 sebesar 100,20 persen dan tahun 2013 sebesar 100,20 persen.

Sementara angka APK pada Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) juga kecenderungannya mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi angka partisipasi kasar (APK) tahun 2011 sebesar 73,24 persen. Artinya secara kuantitatif siswa yang berumur di atas 16 tahun masih mengikuti pendidikan di tingkat SMA/MA. Berdasarkan angka proyeksi diharapkan angka partisipasi kasar (APK) untuk tahun 2012 sebesar 77,29 persen dan tahun 2013 sebesar 82,67 persen. Jika dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK) nasional Tahun 2010 sebesar 62,53 persen. Posisi NTB APK-nya dalam kurun waktu dan jenjang pendidikan yang sama sebesar 67,83 persen, perhatikan dalam Tabel 7.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar di NTB meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mencapai 99,03 persen. Berdasarkan angka proyeksi angka partisipasi murni (APM) tahun 2012 meningkat menjadi 99,49 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,95 persen. Jika kita bandingkan dengan APM secara nasional tingkat SD/MI sebesar 94,72 persen. NTB APM-nya dalam kurun waktu dan jenjang pendidikan yang sama sebesar 98,58 persen. Pada jenjang pendidikan SMP/M.Ts juga mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2011 angka Partisipasi Murni (APM) telah mencapai 85,87 persen. Berdasarkan angka proyeksi pada tahun 2012 juga akan mengalami peningkatan menjadi

Tabel 7. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin 2010

Kab/Kota	APK SD			APK SLTP			APK SLTA		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Lombok Barat	102.66	111.39	106.87	84.18	88.28	86.05	65.05	42.73	54.96
Lombok Tengah	109.91	111.10	110.42	88.82	85.56	87.55	67.08	48.80	57.07
Lombok Timur	107.94	111.08	109.40	78.78	93.03	85.19	53.78	49.59	51.78
Sumbawa	108.54	107.18	107.83	73.00	82.88	77.53	67.62	82.58	74.52
Dompu	111.57	115.94	113.62	81.26	89.17	84.91	86.88	78.48	82.28
Bima	109.36	114.83	111.75	81.24	91.34	85.42	88.55	72.05	80.70
Sumbawa Barat	116.12	106.35	111.34	90.82	110.58	100.12	85.79	59.04	71.58
Lombok Utara	105.62	103.80	104.69	85.05	86.02	85.46	61.94	34.93	50.30
Kota Mataram	106.56	109.43	107.89	80.36	80.65	80.51	79.41	68.00	73.43
Kota Bima	114.56	116.86	115.68	77.46	92.06	83.75	117.56	81.12	97.92
NTB	108.21	110.92	109.47	82.30	88.59	85.07	68.70	57.00	62.89

Sumber: Laporan RPJMD Tahun 2009-2013

Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Thn 2010

Kab/Kota	APM SD			APM SLTP			APM SLTA		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Lombok Barat	95.33	94.92	95.14	71.12	70.88	71.01	56.92	39.62	49.10
Lombok Tengah	94.99	94.14	94.62	78.39	75.27	77.17	54.83	43.73	48.75
Lombok Timur	94.28	96.14	95.15	63.20	79.31	70.44	44.01	39.07	41.65
Sumbawa	97.46	96.51	96.96	65.75	74.32	69.68	50.37	59.10	54.39
Dompu	95.65	96.58	96.08	72.50	66.96	69.95	59.57	50.75	54.74
Bima	94.63	93.38	94.08	70.13	66.02	68.43	62.44	54.82	58.81
Sumbawa Barat	97.25	95.24	96.27	77.62	80.37	78.91	60.34	45.18	52.29
Lombok Utara	93.99	95.23	94.63	75.13	70.07	73.01	51.21	29.22	41.73
Kota Mataram	97.54	94.34	96.05	73.21	64.52	68.64	63.24	48.00	55.24
Kota Bima	94.89	90.28	92.64	69.51	69.27	69.41	67.38	60.73	63.79
NTB	95.23	95.08	95.16	70.93	72.74	71.73	53.72	44.93	49.35

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013.

87,97 persen dan tahun 2013 akan menjadi 90,07 persen. Jika dibandingkan dengan APM secara nasional sebesar 67,62 tahun. NTB APM-nya dalam kurun waktu dan jenjang pendidikan yang sama (Tahun 2010) sebesar 83,77 persen. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas SMA/MA, angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2011 sebesar 61,63 persen. Berdasarkan angka proyeksi angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2012 sebesar 65,67 persen dan mengalami peningkatan menjadi 70,12 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan

APM secara nasional sebesar 45,48 tahun. Sedangkan posisi NTB APM-nya dalam kurun waktu (tahun 2010) dan jenjang yang sama sebesar 57,38 persen.

Berdasarkan data Tahun 2011 capaian Angka Partisipasi Murni (APM) antar Kabupaten/Kota juga terjadi variasi dan telah mengalami pergeseran. Pencapaian APM untuk tingkat SD/MI pencapaiannya tertinggi pada tahun 2011 dicapai oleh kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya diikuti oleh kabupaten Tengah. Sedangkan APM terendah dicapai oleh KSB

yang selanjutnya diikuti oleh kota Bima, KLU, kabupaten Dompu, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat.

Untuk APM tingkat SMP/M.Ts, kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Lombok Tengah menempati ranking tertinggi sedangkan ranking terendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang diikuti oleh Kota Bima dan

kabupaten Lombok Utara (KLU). Untuk APM tingkat SMA/MA/SMK, ranking tertinggi masih dicapai oleh kabupaten Lombok Timur yang diikuti oleh kabupaten Lombok Tengah. sedangkan ranking terendah dicapai oleh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang diikuti oleh Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Bima, perhatikan dalam Tabel 8.

Angka Putus Sekolah (APtS)

Tabel 9. Perkembangan APK, APM dan APtS Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Pelajaran 2009/2010 s.d. 2012/2013.

Jenjang Pendidikan	Tahun Pelajaran	APK (%)	APM(%)	APtS (%)
SD/MI	2009/2010	107,58	98,13	0,76
	2010/2011	109,03	98,58	0,52
	2011/2012	110,47	99,03	0,48
	2012/2013	111,91	99,49	0,34
	2013/2014	111,91	99,95	0,20
SMP/MTs	2009/2010	98,40	81,67	4,30
	2010/2011	99,00	83,77	3,35
	2011/2012	99,80	85,87	2,40
	2012/2013	100,20	87,97	1,45
	2013/2014	100,20	90,07	0,50
SMA/MA	2009/2010	64,72	53,45	4,20
	2010/2011	67,83	57,38	3,53
	2011/2012	73,24	61,63	2,85
	2012/2013	77,29	65,87	2,18
	2013/2014	82,67	70,12	1,50

*) Tahun Pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014, Angka proyeksi

Tabel 10. Penduduk NTB Yang masih Buta Huruf (15-44 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2010

Kabupaten/Kota	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kabupaten Lombok Timur	52.884	72.800	55.474
Kabupaten Lombok Tengah	48.605	78.520	63.667
Kabupaten Lombok Barat	71.191	50.919	38.609
Kabupaten Lombok Utara	-	19.919	16.179
Kota Mataram	12.657	636	-
Kabupaten Sumbawa	5.937	27.281	21.056
Kab.Sumbawa Barat	-	1.265	-
Kabupaten Dompu	5.247	14.704	-
Kabupaten Bima	20.719	36.416	29.833
Kota Bima	4.800	5.916	-
N T B	222.040	308.376	224.818

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013

Berdasarkan data Dikpora tahun 2010 Angka Putus Sekolah (APtS) di provinsi NTB kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) telah mengalami penurunan dari 0,52 persen tahun 2010 menjadi 0,48 persen tahun 2011. Selanjutnya berdasarkan data proyeksi tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,34 persen dan 0,20 persen pada tahun 2013. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APtS) kelompok umur 13-15 tahun (SMP/M/Ts) juga terus mengalami penurunan secara signifikan. Kenyataan ini ditandai dengan menurunnya dari tahun 2010 sebesar 3,35 persen menjadi 2,40 persen tahun 2011. Sementara berdasarkan data proyeksi tahun 2012 akan menjadi 1,45 persen dan terus turun menjadi 0,50 persen di tahun 2013.

Selanjutnya Angka Putus Sekolah (APtS) kelompok umur pendidikan SMA/MA sederajat juga kecenderungannya mengalami penurunan secara signifikan. Sebagai ilustrasi berdasarkan data Dikpora tahun 2010 angka putus sekolah (APtS) kelompok usia pendidikan SMA/MA sebesar 3,53 persen menjadi 2,85 tahun 2011. Sementara berdasarkan data proyeksi tahun 2012 turun menjadi 2,18 persen dan selanjutnya turun menjadi 1,50 persen pada tahun 2013.

Selanjutnya jika dilihat dari persentase perkembangan APK, APM dan APS se Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenjang pendidikannya selama lima tahun terakhir (2009/2010 - 2012/2013) terdapat angka perkembangan yang cukup signifikan. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai gambaran angka partisipasi murni (APK), APM dan APS setiap jenjang pendidikan berdasarkan kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat dapat diperhatikan melalui Tabel 11.

Angka Melek Huruf (AMH)

Dilihat dari perkembangan angka melek huruf di provinsi NTB secara kuantitatif berdasarkan data Dikpora tahun 2010 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Data tahun 2010 menunjukkan angka melek huruf di provinsi NTB sebesar 88,45 persen, tahun 2011 meningkat menjadi 92,10 persen. Selanjutnya berdasarkan

angka proyeksi angka melek huruf di tahun 2012 akan menjadi 96,70 persen dan akan meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2013. Artinya diharapkan Dikpora melalui penyusunan program dan kegiatannya kedepan akan mampu secara tuntas membebaskan masyarakat NTB dari angka buta huruf.

Isu yang masih ada sekarang ini adalah masih tingginya angka buta aksara dan angka putus sekolah (droup-out) di provinsi NTB, sehingga kedepan guna menuntaskan angka buta aksara dan angka putus sekolah tersebut perlu dilakukan revitalisasi dan mobilisasi peran-peran kelembagaan, peran tokoh agama dan tokoh pemuda yang ada di tingkat lokal atau di tingkat yang paling bawah (desa-desa), melalui program-program: pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan luar biasa. Yang diperkuat dengan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca tulis dan pembinaan dan program manajemen pelayanan pendidikan. Selanjutnya kedepan melalui regulasi sistem pendidikan di tingkat daerah harus didorong pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data tahun 2008 jumlah penduduk NTB yang masih buta huruf (15-44 tahun) tertinggi berada di kabupaten Lombok Barat diikuti dengan Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kabupaten Bima. Selanjutnya jumlah angka buta huruf terendah dicapai oleh Kota Bima yang diikuti oleh Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram. Tahun 2009 mengalami pergeseran tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah diikuti dengan Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Selanjutnya jumlah angka buta huruf terendah dicapai oleh Kota Mataram yang diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barata (KSB) dan Kota Bima. Tahun 2010 tertinggi berada di kabupaten Lombok Tengah diikuti dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya jumlah angka buta huruf terendah dicapai

Tabel 11. Penduduk NTB Yang Mengikuti Program Keaksaraan Fungsional Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2008 – 2010

Kabupaten/Kota	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
Kabupaten Lombok Timur	6.610	55.534	27.647
Kabupaten Lombok Tengah	6.370	63.667	34.906
Kabupaten Lombok Barat	11.920	38.609	-
Kabupaten Lombok Utara	-	16.179	-
Kota Mataram	4.640	-	-
Kabupaten Sumbawa	3.520	21.056	-
Kab.Sumbawa Barat	2.270	-	-
Kabupaten Dompu	2.240	-	-
Kabupaten Bima	4.210	30.133	-
Kota Bima	1.400	-	-
N T B	43.180	225.178	62.553

Sumber: Matrik RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013

Tabel 12. AMS Menurut Jenjang Pendidikan dan Usia Sekolah di Indonesia Tahun 2007-2010

Jenjang Pendidikan	Kelompok Umur	AMS	AMS	AMS	AMS
		2008	2009	2010	2011
SD/MI	7-12	95.373	87.511	87.785	
SMP/MTs	13-15	64.973	66.897	73.610	
SMA/MA	16-18	178.850	190.661	191.411	
JUMLAH		339.196	345.069	352.806	

Sumber: BPS – RI, Susenas 2003-2010

oleh Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diikuti oleh, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

Salah satu program pemerintah dalam rangka menurunkan angka buta huruf masyarakat NTB melalui program keaksaraan fungsional yang dilakukan sejak tahun 2008 di seluruh kabupaten/kota seperti yang tertuang dalam Tabel 11.

Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)

Menurut data RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 Angka melanjutkan sekolah (AMS) tingkat SD/MI di NTB tahun 2008 sebanyak 95.373, tahun 2009 sebanyak 87.511 dan tahun 2011 sebanyak 87.785. Untuk tingkat SMP/M.Ts tahun 2008 sebanyak 64.973, tahun 2009 sebanyak 66.897 dan tahun 2010 sebanyak 73.610. Sedangkan tingkat SMA/MA tahun 2007 sebanyak 167.732, tahun 2008 sebanyak 178.850, tahun 2009 sebanyak 190.661 dan tahun 2010

sebanyak 191.411 orang. Lebih jelasnya dapat diperhatikan pada Tabel 12.

SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi NTB sejak tahun 2009-2012 rata-rata mencapai 6,29%, Jika dikaitkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD tahun 2009-2013 rata-rata sebesar (6,37%) masih belum mencapai target. Akan tetapi jika dilihat selama 4 (empat) tahun terakhir 2009-2012, maka pertumbuhan ekonomi telah mencapai target RPJMD sebesar 6,21%. Sekalipun demikian pertumbuhan ekonomi dimaksud telah berimplikasi terhadap pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara positif. Artinya pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 (empat) tahun terakhir telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dari aspek pendidikan, APK tingkat

SD sederajat sebesar 109,47%, tingkat SMP sederajat sebesar 85,07% dan tingkat SMA sederajat sebesar 62,89% selama tahun 2009-2013. APM tingkat SD sederajat sebesar 95,16%, tingkat SMP sederajat sebesar 71,73% dan tingkat SMA sederajat sebesar 49,35% selama tahun 2009-2013. APS selama 4 tahun terakhir untuk tingkat SD sederajat sebesar 98,26%, tingkat SMP sederajat sebesar 86,52%, tingkat SMA sederajat sebesar 57,71%. Sedangkan APS tingkat PT sebesar 12,69%. AMS tingkat SD sederajat selama 4 tahun terakhir sebesar 99,59%, tingkat SMP sederajat sebesar 95,05% tingkat SMA/MA sebesar 97,50%, SMK sebesar 97,25% (target RPJMD) 2009-2013.

Kenaikan capaian semua indikator pendidikan (APK, APM, APS, AMS dan AMH) serta penurunan Angka Putus Sekolah (APtS) selama 4 (empat) tahun terakhir telah mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2006). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistik (2007). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistik (2009). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistik (2010). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistik (2011). Nusa Tenggara Barat Dalam Angka. Nusa Tenggara Barat: Badan Pusat Statistika.
- Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2009). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2013 : Bappeda NTB.
- Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri.
- Gunting, K. C. et al, (2008). Pembangunan manusia di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, 4(1). 17-24.
- Hasbullah, Yusuf. (2007). Analisis rasio keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2002-2005). Mataram Press Majalah Ilmiah ORIZA Universitas Mataram, 6(2).
- Hasbullah, Yusuf. (2007). Analisis Kemampuan Daerah Kota Mataram. Penerbit: Mataram Press Majalah ilmiah ORIZA Universitas Mataram Vol.VI/No.3 Juli 2007.
- Hasbullah, Yusuf. et al. (2011). Rencana Aksi Daerah Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (RAD-MP3EI). Provinsi Nusa Tenggara Barat: Bappeda Provinsi NTB.
- Hasbullah, Yusuf. et al. (2011). Penyusunan Evaluasi Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Bappeda Provinsi NTB.
- Hasbullah, Yusuf. Et al. (2013). Kredit dan Kapital Bank Perkreditan Rakyat Se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2013. Distribusi Edisi ke XXXIII tahu ke XXII Desember 2013 vol 2
- Jhingan, M.L. (2002). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.*, PT. Radja Grafindo. Jakarta: Persada Jakarta.)
- Khorasgani, Mahdi Fadaee. (2008). Higher Education Development and Economic Growth in Iran. *Eduaction, Business and Society : Contemporary Middle Eastern Issues Vol 1 Issue 3 pp 162-174.*
- Kuncoro, Mudrajad. (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Erlangga. Jakarta.
- Li, Hongyi., & Liang Huang. (2010). Health, Education, and Economic Growth in East Asia. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies Vol 3 Issue 2 pp 110-131.*
- Loizides, John., & George Vamvoukas. (2005). Government expenditure and economic growth: evidence from trivariate causality testing. *Journal of Applied Economics*, 8(1). 125-152.
- Mardiasmo. (2000). Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta: BPFE
- Mirza, Denni Sulistio. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol 4 No 2, September 2011
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda., & Hesel Nogi S. Tangkilisan. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Omojimate, Ben U. (2011). Building Human Capital for Sustainable Economic Development in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*, 4(4)183-189.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Teles, Vladimir Kuhl., & Andrade Joaquim. (2008). Public Investment in Basic Education and Economic Growth. *Journal of Economic Studies*. Vol 35 Issue 4 pp 352-364.